



Subag Humas dan TU  
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

MEDIA
MERCUSUAR

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	<input checked="" type="checkbox"/>	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	<input checked="" type="checkbox"/> Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	----------------	--	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

### Tegaskan januari batas serah terima aset

**PARMOUT, MERCUSUAR** - Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, Badrun Ngeai mengungkapkan kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik untuk menyelesaikan persoalan aset pada bulan ini.

Hal itu diungkapkannya kepada sejumlah media Rabu (11/1/2017) di ruang kerjanya. Ditegaskannya bahwa dalam serah terima tersebut aset-aset yang akan diserahkan, juga harus diserahkan aset keuangan. Hal ini dilakukan agar masing-masing pimpinan SKPD bertanggung jawab terhadap aset dan keuangan pada instansi yang dipimpinya.

"Sebagaimana setelah serah terima jabatan langsung dilaksanakan dengan serah terima kasih dan keuangan. Tapi sampai saat ini belum ada pimpinan SKPD yang melakukan serah terima aset. Saya minta persoalan aset ini harus tertuntas bulan ini juga," tegas Badrun.

Ditambahkannya pihaknya akan monitoring serah terima aset itu melalui laporan dari Bidang Aset. Jika ternyata hingga akhir bulan ini masih ada pimpinan SKPD yang belum melakukan serah terima aset, maka pihaknya akan memanggil pimpinan SKPD dan akan memberikan teguran keras.

Badrun mengungkapkan, selama ini ketika terjadi rusuh pimpinan SKPD, aset dari SKPD sebetulnya terutama kendaraan roda empat selalu dibawa ke tempat tugas baru. Akibatnya pendataan aset jadi kacau belah.

Karenanya Badrun berharap agar persoalan itu tidak terulang lagi. Apalagi katanya masalah aset selalu menjadi salah satu penyebab rusuh. Makanya ia minta para pimpinan SKPD agar memperhatikan hal itu tidak saja akan merugikan (WTP) dan BPK.

"Selama ini kita belum mendapat penilaian WTP dengan pengecualian (WTP) dari BPK salah satunya disebabkan persoalan aset yang tidak tertuntas. Makanya saya minta para pimpinan SKPD agar memperhatikan hal itu tidak saja akan merugikan (WTP) dan BPK."